

**PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN *SISTEM AKUNTANSI
PESANTREN INDONESIA (SANTRI) DI INDONESIA***

Mohammad Romli
STEI MM Pamekasan
Email : m.romli85@gmail.com

Abstrak

Bentuk perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren salah satunya saat ini adalah dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI). PAP ini disusun berdasarkan acuan SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta menggunakan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba serta ISAK syariah. PAP ini merupakan salah satu program pengembangan kemandirian Ekonomi Pesantren.

Pentingnya Akuntansi sebagai sistem pencatatan keuangan sekaligus sebagai alat pertanggung jawaban keuangan baik kepada manusia maupun Sang Pencipta, tidak terelakkan termasuk untuk lembaga sektor publik khususnya pondok pesantren. Oleh karena pondok pesantren adalah organisasi nirlaba yang memiliki ciri khas tersendiri, maka perlu dibuat standar akuntansi khusus untuk pondok pesantren yang bertujuan untuk mengimplementasikan pedoman tersebut ke dalam kondisi riil pondok pesantren.

Pedoman ini dibuat supaya pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren itu sendiri.

Kata Kunci: SANTRI, SAK ETAP, PSAK NO. 45, Pesantren

1. Pendahuluan

Pondok pesantren atau sering juga disebut sebagai pesantren merupakan model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Secara historis, lembaga ini mulai berkembang sejak zaman para da'i di tanah Jawa, Walisongo, sekitar abad 15. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren yang berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Dengan demikian, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kedudukan pesantren tidak hanya sebagai lembaga keagamaan dan

lembaga pendidikan, namun juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi faktor penentu dimana meskipun sudah berumur ratusan tahun, pesantren sampai saat ini tetap eksis menjadi bagian integral kekuatan bangsa, bahkan semakin kokoh.

Pesantren lahir dan berkembang atas inisiasi dan peran masyarakat. Ini berarti bahwa pondok pesantren telah menyatu dengan masyarakat. Memisahkan pesantren dengan masyarakat berarti akan menggerus eksistensi pesantren, yang selama ini menjadi kekuatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat telah terjalin hubungan yang mutualisme, saling membutuhkan dan interdependent (saling bergantung satu sama lain).

Pesantren dapat berupa satuan pendidikan, atau dikatakan sebagai Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan, atau dapat berupa penyelenggara pendidikan (Pesantren Sebagai Penyelenggara Pendidikan), apabila pondok pesantren tersebut selain menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren, secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Pada prakteknya, banyak pesantren yang selain menyelenggarakan pendidikan pesantren juga menyelenggarakan pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, sekolah, madrasah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan atau vokasi, atau bentuk pendidikan lainnya.

Dengan melihat urgensi pesantren tersebut, perhatian dan peran aktif dari semua pihak dalam rangka menjaga dan memajukan peran pesantren adalah merupakan sebuah keharusan, lebih lebih dari pemerintah. Untuk itu muncul sebuah regulasi untuk pesantren terkait Akuntansi Pesantren yang digagas oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meskipun sifatnya tidak mengikat dan harus diterapkan untuk seluruh pesantren, yang dikenal dengan Pedoman Akuntansi Pesantren atau *Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI)*.

PAP ini merupakan salah satu program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren ada tiga. *Pertama*, pengembangan unit usaha pesantren dengan memanfaatkan kerjasama antar pesantren. *Kedua*, terjalinnya kerjasama antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren. *Ketiga* adalah pengembangan pengembangan

holding pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren yang diberi nama SANTRI.

Akuntansi pesantren ini hadir untuk membantu penyusunan laporan keuangan bagi manajemen pesantren. Munculnya akuntansi pesantren salah satunya adalah untuk menegaskan terkait dengan aset pesantren. Bagian mana yang milik pribadi pimpinan pesantren, dan bagian mana yang milik pesantren hasil bantuan atau wakaf umat. Tujuannya jelas, demi keberlangsungan pesantren, kemakmuran dan profesional pengelolaannya.

Dalam implementasinya pedoman akuntansi pesantren ini tidak akan semudah yang diharapkan, namun pula bukan sebuah kemustahilan, jika usaha dan partisipasi yang maksimal dari semua pihak, penerapan pedoman akuntansi pesantren ini akan ada jalan dan prospek di masa yang akan datang. Karena untuk transparansi untuk umat, regulasi ini dirasa sangat baik untuk pesantren juga untuk keberlangsungan pesantren sendiri.

2. Metologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2011) penelitian menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Penelitian ini adalah menggunakan data dokumenter menurut Indriantoro (2002) yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara (Indrianto, 2012). 2. Data sekunder merupakan penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indrianto, 2012).

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah 1. wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 2012). 2. Metode dokumenter adalah metode yang di gunakan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006).

3. Pembahasan

A. Pesantren

1) Definisi Pesantren

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, definisi pondok pesantren dijelaskan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Karakteristik penting dari pondok pesantren adalah pondok pesantren adalah pendidikan berbasis masyarakat atau diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pesantren yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2) Tujuan Umum Pesantren

Tujuan pesantren sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan keagamaan Islam, yaitu menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, serta mengembangkan pribadi akhlakul karimahbagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran · sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Tujuan

memegang peranan penting, akan mengarahkan dan mewarnai komponen-komponen lainnya.

3) Unsur Pesantren

Secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren bisa disebut juga dengan *Arkanul Ma'had*, yaitu:

a) Kyai atau Sebutan lain sejenis.

Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan *stakeholder* pesantrennya. Kyai/pengasuh pesantren wajib berpendidikan pondok pesantren. Sementara pengalaman belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan sebagai kompetensi pendukung bagi kapasitas pengasuh pesantren. Selain kyai, pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

b) Santri Mukim

Santri mukim adalah santri yang tinggal dan berada di dalam pondok pesantren selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan. Di samping santri mukim, pesantren juga ada yang menerima santri yang tidak mukim atau biasa dikenal dengan santri kalong. Namun, keberadaan santri kalong ini tidak menjadi unsur pokok pondok pesantren, melainkan sebagai faktor penunjang atau suplemen aspek kesartrian

c) Pondok atau Asrama Pesantren

Ini merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren. Pondok, atau asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau di daerah Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, hanya namanya yang berbeda. Agar dapat menjalankan fungsinya, pondok atau asrama pesantren tersebut tentunya wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

d) Masjid atau Mushalla

Merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi antara pesantren dengan masyarakat dan

menghindari eksklusivisme pesantren. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla itu dapat difungsikan juga sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman

e) Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama menganut paham *Syafi'iyah* merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren untuk mendalami pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam dimana tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Jika kitab kuning merupakan beberapa literatur tertentu yang biasanya dikaji dari awal hingga akhir maka dirasah islamiyah

dengan pola pendidikan mu'allimin merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan terorganisasi yang bersifat integratif memadukan ilmu agama dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan

memadukan intra, ekstra dan kokurikuler, yang oleh sebagian pesantren dikenal dengan sebutan sistem *madrasy*.

f) Tipe Pesantren.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979, pondok pesantren (ponpes) dibagi menjadi empat tipe:

- 1) Ponpes tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan atau sorogan).
- 2) Ponpes tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- 3) Ponpes Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- 4) Ponpes tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Dilihat dari segi fasilitas, pesantren dibagi menjadi 5 pola:

Pola 1: Adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kiai

Pola 2: Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai dan pondok

Pola 3: Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok dan

madrasah

Pola 4: Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok,

madrasah, dan rumah keterampilan

Pola 5: Adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, Gedung pertemuan, tempat olahraga dan sekolah umum

g) Fungsi Pesantren

- 1) Lembaga Pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fi addin*) dan nilai-nilai islam (*Islam values*)
- 2) Lembaga keagamaan yang melakukan control social (*social control*)
- 3) Lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa social (*social engineering*)

B. Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI)

Salah satu bentuk perhatian negara terhadap pesantren adalah dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI). PAP ini telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) bertepatan dengan kegiatan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya tanggal 7 – 11 November 2017.

PAP ini disusun berdasarkan acuan SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta menggunakan PSAK no 45 tentang organisasi nirlaba serta ISAK syariah. Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah. Format Penyajian atas laporan keuangan Pondok pesantren yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren mengaju pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan Pemilik Yayasan. Dalam konsep entitas unit akuntansi dijelaskan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit

akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau perusahaan lain.

Pedoman Akuntansi Pesantren sangat penting dan strategis. Pentingnya PAP ini bisa ditinjau dari dua versi, pertama versi Bank Indonesia (BI) dan kedua versi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dari sudut pandang BI:

- 1) Pengembangan pesantren secara khusus telah pula menjadi salah satu target pengembangan ekonomi syariah mengingat perannya yang juga cukup strategis.
- 2) Pesantren yang maju dan modern memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi syariah dalam bentuk peningkatan produksi barang dan jasa serta mencetak sumber daya insani.
- 3) Salah satu program untuk mendorong adalah peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan pesantren melalui tersedianya laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang diterima secara luas dan diterima berbagai pihak.

Sedangkan dari sudut pandang Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);

- 1) Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren menjadi perhatian, seiring dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Dengan adanya pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memudahkan pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya, serta dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan pondok pesantren

Tujuan Laporan Keuangan yang disajikan oleh pondok pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi;
- 2) Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya

Entitas pelaporan keuangan dalam PAP ini adalah pondok pesantren yang memiliki badan hukum yayasan. Aset dan liabilitas dari pondok pesantren

ini harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perorangan.

Laporan keuangan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriyah atau masehi dengan komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1) Laporan posisi keuangan

Menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari Yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai asset, liabilitas, dan asset neto dari Yayasan pondok pesantren, serta hubungna antar unsurunsur tersebut pada waktu tertentu.

3) Laporan aktivitas;

Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan Yayasan pondok pesantren selama suatu periode laporan tertentu. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

4) Laporan arus kas;

Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari Yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu.

5) Catatan atas laporan keuangan.

Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan pesantren, aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan liabilitasnya disajikan menurut urutan jatuh temponya

dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Aset netto disajikan aset netto tidak terikat, aset netto terikat kontemporer dan aset netto terikat permanen. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung.

Penyajian laporan keuangan pesantren didasarkan pada konsep materialitas, Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Penanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah pengurus pondok pesantren. Laporan Keuangan Yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa Indonesia. Mata uang fungsional yang digunakan adalah rupiah. Transaksi pesantren yang menggunakan mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi. Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP. Dalam hal SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan dapat diandalkan.

Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, maka harus mempertimbangkan:

- 1) Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa.

- 2) Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran asset, liabilitas, pendapatan dan beban dalam konsep dan prinsip Pervasif dari SAK ETAP;
- 3) Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan proses dan kegiatan bisnis pesantren, yaitu: a) Entitas pesantren, b) Kegiatan pendidikan, c) Kegiatan komersial
- 2) Kebijakan akuntansi dan daftar akun (chart of account), yaitu: a) Kebijakan akuntansi neraca awal, b) Kebijakan akuntansi laporan keuangan
- 3) Penyusunan neraca awal
- 4) Penyusunan laporan keuangan tahunan, Laporan keuangan lengkap

Pencatatan penghasilan tidak terikat pesantren berupa:

- 1) Kontribusi santri
- 2) Hibah pendiri dan pengurus
- 3) Bantuan pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan
- 4) Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya
- 5) Penghasilan tidak terikat lai

Sedangkan pencatatan beban tidak terikat berupa:

- 1) Beban pendidikan
- 2) Beban akomodasi dan konsumsi
- 3) Beban umum dan administrasi

C. Peluang dan Tantangan

Dalam rangka implementasi SANTRI, Bank Indonesia (BI) telah melakukan sosialisasi SANTRI kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, antara lain sosialisasi ini dilakukan kepada perwakilan 47 Pesantren di seluruh Indonesia pada tanggal 18-19 Juli 2019 di hotel Mercury Sabang Jakarta. Dalam sosialisasinya BI menggandeng Gamatechno sebagai developer aplikasi SANTRI. Sedangkan untuk menyusun pedoman keuangan pesantren, BI bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Perlu diketahui, bahwa SANTRI memiliki dua modul besar, yaitu aplikasi untuk keuangan pesantren serta pendidikan dan aplikasi untuk unit usaha pesantren. Aplikasi SANTRI sendiri memiliki dua fitur unggulan yakni sistem keuangan dan sistem pembayaran santri.

Penerapan SANTRI di Indonesia tentu memiliki peluang dan tantangan tersendiri, karena banyaknya jumlah pesantren yang ada dan akan menjadi entitas pelapor keuangan dalam PAP ini. Berdasarkan data dari Pengelola Data Pondok Pesantren (PDPP) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 26.000 lembaga dengan total santri mencapai 4 juta jiwa, jika melihat dari statistiknya, tentu akan selalu akan bertambah dan meningkat setiap tahunnya.

Walaupun masih baru, program PAP ini tentu sangat berpeluang dan akan mendapat sambutan yang baik dalam penerapannya, baik dari kalangan pesantren sendiri maupun dari luar pesantren karena beberapa faktor;

1) Faktor historis

Secara historis, pondok pesantren telah dikenal perannya sejak zaman sebelum kemerdekaan, baik dibidang pendidikan, perjuangan, kemasyarakatan, dan bidang sosial. Saat ini pula pesantren telah banyak berkontribusi dalam banyak bidang, apalagi dalam bidang penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI), akan lebih mudah.

2) Faktor keilmuan

Di banyak pesantren diajarkan tentang berbagai macam keilmuan, baik ilmu agama dan juga ilmu umum. Ilmu umum yang diajarkan antara lain ilmu ekonomi dan akuntansi. Bahkan di beberapa pesantren saat ini telah membuka kampus-kampus dengan program studi bidang ekonomi dan akuntansi, bahkan ada pula pesantren yang membuka program studi akuntansi syariah. Di bidang ilmu agama juga diajarkan tentang muamalah, *ahkamul buyu'*, hukum perserikatan dan lain sebagainya.

Selain itu di pesantren di ajarkan nilai-nilai akhlakul karimah yang didasarkan pada tauhid, antara lain; pesantren mengajarkan sifat-sifat wajib bagi rasul dan ini bisa di aplikasikan dalam bidang akuntansi, sifat wajib bagi rasul yaitu: *1)Siddiq*, seorang Akuntan harus bekerja dengan benar. Benar dan

jujur dalam menerapkan kriteria, standar, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang mengikat dirinya dalam menjalankan profesinya. Misal, kebenaran seorang akuntan publik membuat laporan audit independen dapat menyelamatkan pemilik, investor, kreditur, atau pengguna lainnya atas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. **2) Amanah**, seorang Akuntan harus memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi. Kesadaran dan keyakinan bahwa hasil pekerjaannya tidak sekedar untuk dipertanggungjawabkan ke atasan atau pemberi tugas, namun lebih dari itu, sebagai makhluk juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT, maka akan mendorong akuntan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan profesinya dengan amanah. **3) Tabligh**, seorang Akuntan harus memiliki keberanian dalam menyampaikan hasil pekerjaannya. Risiko disukai atau tidak disukai harus diabaikan demi menyampaikan informasi yang sesungguhnya. **4) Fathonah**, seorang Akuntan harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan profesi akuntan yang dipilihnya, apakah sebagai akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, ataukah akuntan pemerintah. Sehingga supaya professional, keinginan untuk terus belajar harus dipelihara.

Ini semua bisa membantu pesantren dalam menyambut dan menerapkan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) yang baru-baru ini diluncurkan pemerintah.

3) Faktor ekonomi

Pondok pesantren saat ini banyak yang memiliki unit usaha, baik dibidang keuangan, sektor perdagangan, properti dan lain sebagainya. Salah satu contoh Unit Usaha pesantren adalah Pondok Pesantren Sidogiri yang berada di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, memiliki unit usaha berupa BMT UGT Sidogiri yang saat ini omzetnya mencapai 66 Triliun. Ini baru satu pesantren. Belum lagi pesantren-pesantren lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu mereka telah banyak yang melakukan pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ini akan memudahkan dalam penerapan aplikasi SANTRI.

Namun selain peluang yang ada, penerapan PAP ini akan menghadapi beberapa tantangan ke depan, antara lain:

1) Faktor Kultural

Ada beberapa pesantren yang dari pendirian sampai pengelolaannya dilakukan secara kultural. Pencatatan dan pendataan aset sulit dilakukan, karena sulit memisahkan dan membedakan antara aset pesantren dan aset pengasuh atau pengelola, karena mayoritas aset milik pengasuh dan pembiayaan dari pengasuh pula sehingga akan mendapatkan kendala dalam pengakuan aset yang ada. Apalagi kultur di beberapa pesantren masih agak kaku, semua masih tergantung dan pada pengasuh.

2) Faktor Teknologi

Dalam pencatatan administrasi dan keuangannya, pondok pesantren masih menggunakan sistem pencatatan tradisional atau pencatatan sederhana. Hanya beberapa pesantren yang melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya. Sehingga penerapan SANTRI dilingkungan pesantren akan mengalami kendala dan butuh usaha yang maksimal.

3) Faktor Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) dalam merupakan kebutuhan fundamental dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan pesantren yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Di pesantren salaf kurikulum pendidikan yang dijalankan hanya kitab-kitab klasik dan pengelolaannya secara tradisional, sehingga output santrinya menjadi salaf juga serta tidak menguasai ilmu keuangan dan akuntansi. Hal ini akan menjadi kendala tersendiri dalam pelaporan keuangan sesuai dengan PAP yang baru di luncurkan.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) dibuat supaya pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren itu sendiri

- 2) Prospek PAP ini ada peluang dan tantangan dalam penerapannya. Peluang yang dimaksudkan adalah kemudahan dalam implementasinya dan mudah di terima. Hal ini terjadi karena dukungan beberapa faktor; *pertama* faktor historis, *kedua* faktor keilmuan, *ketiga* faktor ekonomi. Namun ada pula tantangan yang harus dihadapi antara lain; *pertama* faktor kultural, *kedua* faktor teknologi, *ketiga* faktor Sumber Daya Insani (SDI).
- 3) Sosialisasi PAP ini perlu di intensifkan lagi, mengingat jumlah pesantren di Indonesia yang tidak sedikit, bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Selain itu, pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, yang secara geografis, penggunaan dan penguasaan teknologi yang sangat variatif dan lain sebagainya. dalam sosialisasi ini harus melibatkan semua pihak, baik IAI, BI, Kementerian Agama yang secara institusional membawahi pesantren, para kiayi, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang dapat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- <http://infodanpengertian.blogspot.com/2016/01/pengertian-penelitian-kualitatif.html>

<https://www.gamatechno.com/news/bersama-gamatechno-bank-indonesia-gelar-sosialisasi-aplikasi-santri/>

<http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2011/01/28/sudah-seharusnya-akuntan-merujuk-pada-sifat-rasul-allah/>

<https://www.jpnn.com/news/muhaimin-iskandar-alhamdulillah-omzet-bmt-sidogiri-sudah-rp16-triliun>

<https://jogjainside.com/bmt-ugt-sidogiri-lembaga-keuangan-mikro-terkaya-di-indonesia/>